

Pengaruh Rekonsiliasi Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas (Study Kasus Pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri Lampung Tengah)

Siti Hujaimah ¹, Hendra Novian ²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah

 sitikhuzaimah833@gmail.com

 hnfarras@gmail.com

Abstract : Rekonsiliasi adalah proses penyocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Laporan keuangan merupakan tolak ukur dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Pemakai eksternal menjadikan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pondok pesantren Mafatikhul Huda telah menyajikan atau membuat laporan keuangan dalam bentuk pembukuan dengan menggunakan pencatatan single entry. Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode kuantitatif yang menggunakan metode *ex post facto*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa rekonsiliasi berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian kas pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri.

Kata Kunci: *Reconciliation, Cash Control Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Umumnya setiap perusahaan atau organisasi, baik perusahaan besar maupun kecil pasti mempunyai kas untuk memenuhi kebutuhan atau kegiatan perusahaan, baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Kas merupakan sumber atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan. Pengendalian yang memadai sangat dibutuhkan untuk melindungi kas yang ada. Pengendalian merupakan sistem dan prosedur yang digunakan organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang akurat serta mendorong ketaatan terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam implementasinya, manajemen perlu mengadakan penelaahan pengendalian intern guna



memperbaiki adanya kesalahan dan penyelewengan yang mungkin terjadi dan dapat mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal organisasi tersebut.¹

Layaknya organisasi atau lembaga pendidikan lainnya, Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendang Asri juga tengah mengalami tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukannya. Berbagai tuntutan tersebut dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik, termasuk lembaga atau organisasi di lingkup Pendidikan Pesantren, akuntansi Lembaga Pendidikan Pesantren merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk yang lengkap maupun akuntansi secara sederhana sekalipun, karena mengingat bentuk kegiatan yang sangat kompleksitas mulai dari pagi hingga dini hari.

Dalam konteks idealita, secara umum tidak ada satu Pendidikan Pesantren manapun yang bertujuan tidak jujur, melanggar amanah, maupun lari dari tanggung jawab serta tidak menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan tidak sungguh-sungguh. Apabila program sudah dijalankan, maka pelaksanaannya harus diikuti dengan pertanggungjawaban. Jadi, seluruh aspek dalam pengelolaan Pendidikan Pesantren menjadi bahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penganggung jawab program atau pelaku pihak pesantren. Performa yang baik akan dapat terwujud jika suatu Organisasi melakukan pengendalian intern dengan baik karena dengan pengendalian intern, organisasi akan dapat meminimalisasi tindakan-tindakan yang dapat merugikan organisasi, yaitu dengan cara memberikan pengawasan dan pengendalian khusus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem administrasi serta sistem akuntansi yang dijalankan oleh organisasi tersebut.

Pengendalian pada sistem administrasi berfungsi untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja sedangkan pengendalian pada sistem akuntansi bertujuan untuk pengamanan harta organisasi dan dipercayainya laporan keuangan karena pada sistem akuntansi terdapat pengolahan formulir, catatan, dan laporan yang dari keseluruhan tersebut dapat dihasilkan informasi akuntansi yang berguna untuk pengelolaan organisasi tersebut.

Dalam kutipan Vivi Novita Sari dengan judul skripsi Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara tahun 2013 (skripsi Universitas Sumatera Utara). Berdasarkan hasil penelitiannya, bahwa setiap perusahaan harus tetap menjaga jumlah uang kasnya agar tetap mencukupi pembiayaan operasionalnya sehari-hari. Manajemen kas yang efektif juga memerlukan pengendalian intern yang baik guna melindungi kas dari pencurian atau penggelapan kas. Secara umum, sistem pengendalian kas dibedakan antara

¹ Mega Purnama Garnasih Fatmawati Sutarti ‘*Pengaruh Sisitem Akuntansi Dan Rekonsiliasi Bank Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas Pada Koperasi Sejahtera*’ (Bogor : Kampus Ilmu Ekonomi Kesatuan,2018) hlm. 1

pihak yang menangani pemasukan dan pengeluaran dengan pihak yang melakukan pembukuan. Hal ini bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi dalam pencatatan/pembukuan. Dalam pengendalian kas pihak manajemen harus dapat menetapkan tanggung jawab dan tugas secara khusus dalam menangani penerimaan dan pengeluaran kas, mengadakan pemisahan terhadap penanganan dan pencatatan penerimaan kas, mengadakan audit internal pada selang waktu tertentu terutama pemeriksaan terhadap keadaan kas organisasi, memilih dan menetapkan penanggung jawab yang jujur dalam memegang kas organisasi.

Kas merupakan alat pembayaran yang dimiliki perusahaan atau organisasi dan siap digunakan di dalam transaksi setiap saat diinginkan. Namun kas juga merupakan aktiva yang paling sensitive terhadap tindak kecurangan oleh manajemen, sebab kecil volume fisiknya, tidak mencantumkan identitas pemiliknya, dan mudah ditransfer menjadi aktiva lain. Kerugian yang mungkin timbul dari perbuatan tidak etis itu dapat dihindari atau diminimumkan dengan pengendalian intern yang memadai terhadap perubahan kas sejak diterima pertama kali hingga dikeluarkan dari organisasi. Apabila pengendalian intern tidak memadai maka akan sangat potensial terjadinya penggelapan kas.²

Melindungi kas dan menjamin keakuratan catatan akuntansi untuk kas dalam pengendalian yang efektif atas kas merupakan suatu keharusan. Pengendalian yang baik menghindari terjadinya penyelewengan seperti melakukan perubahan laporan dan perhitungannya, adanya prosedur pencatatan yang sesuai sehingga dapat dilakukan pengendalian yang tepat terhadap harta, utang, pendapatan, dan biaya.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan dan membahas penelitian dengan judul “Pengaruh Rekonsiliasi Terhadap Efektifitas Pengendalian Kas di Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendang Asri”.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, penulis mengambil lima penelitian terdahulu yang diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat membantu penelitian yang akan dilakukan penulis.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Muh Abdul Rohim (2017)	Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Pondok Pesantren	Deskriptif Kualitatif	Pondok pesantren Miftahul Huda Malang memiliki sistem pengendalian yang baik, yaitu setiap

² Ibid. hlm.2

Pengaruh Rekonsiliasi Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas
(Study Kasus Pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri Lampung Tengah)

		Miftahul Huda Malang		organisasi memiliki tugas dan wewenang yang jelas tetapi ada beberapa bagian yang perlu dibenahi seperti pemisahan tugas dari setiap anggota organisasi dan pembuatan laporan keuangan yang baik dan handal.
2	Sever Ramapius Gulo (2021)	Analisis Pengaruh Kompetensi Rekonsiliasi, Pengujian Koreksi Dan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias	Survei Analitik Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan kompetensi rekonsiliasi, pengujian koreksi dan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias.
3	Bagus Haris Sugiarto (2017)	Evaluasi Sistem Dan Prosedur Audit Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus Pada Pendidikan Pesantren Ma Unggulan Amanatul Ummah Program Madrasah Berbasis Internasional)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit internal telah memadai dimana audit keuangan telah mengikuti standar-standar minimal yang ditetapkan. Audit internal telah cukup berperan dalam mengefektivaskan pengendalian internal lembaga.
4	Mega Purnama Garnasih Fatmawati Sutarti (2018)	Pengaruh Sistem Akuntansi Kas Kecil Dan Rekonsiliasi Bank Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas (Studi Kasus Pada Koperasi Sejahtera Bersama)	Deskriptif Analisis	Hasil penelitian menunjukan bahwa Koperasi Sejahtera Bersama telah menggunakan sistem akuntansi kas kecil dan rekonsiliasi bank terhadap efektivitas pengendalian kas. Dimana pengendalian yang efektif dalam perusahaan ini harus dipertahankan agar

				Koperasi Sejahtera Bersama dapat mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.
5	Marchel Tandri (2015)	Efektifitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas di RSUD Pancaran Kasih Sayang GMIM Manado	Kualitatif	Sistem Pengendalian di RSUD Pancaran Kasih Sayang GMIM Manado yang diterapkan berdasarkan peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian pemerintah cukup efektif, hal ini masih terdapat bagian unsure – unsure sistem pengendalian pemerintah yang belum diterapkan.

Metode Penelitian

Jenis metode yang dilakukan dalam penelitian adalah metode kuantitatif yang menggunakan metode *ex post facto*. Menurut Creswell (2010, hlm. 27) “penelitian kuantitatif menguji suatu teori dengan cara memerinci hipotesis – hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis tersebut.”

Metode penelitian merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan metode penelitian akan mempengaruhi pada proses dan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *ex post facto* atau kausal komperatif. Menurut Sukmadinata (2005, hlm. 89), mengatakan bahwa “ penelitian *ex post facto* (ex post facto research) yaitu untuk meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan (dirancang dan dilaksanakan) oleh peneliti. Selanjutnya dikatakan bahwa penelitian *ex post facto* dilakukan terhadap program atau kegiatan yang telah berlangsung.”

Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *ex post facto* untuk menggambarkan penelitian secara empiris dengan variable : pengaruh rekonsiliasi (X) terhadap efektivitas pengendalian kas (Y), pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pondok Pesantren

Kata pondok berasal dari bahasa arab yaitu “funduq” yang artinya ruang tidur,

menunjukkan tempat sehingga berarti “tempat para santri”. Sedangkan pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapat imbuhan awalan “pe” dan akhiran “an”. Terkadang pula pesantren dianggap sebagai gabungan dari kata “santri” (manusia baik) dengan suku kata “tra” (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan sebagai tempat pendidikan manusia baik – baik.³

Secara terminologi, pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Perlu dijelaskan bahwa pengertian “tradisional” dalam definisi ini bukan berarti ketinggalan zaman, tetapi merujuk pada pengertian bahwa lembaga ini telah hidup sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 mengklasifikasikan pondok pesantren menjadi:

1. Pondok Pesantren Tipe A, yaitu pondok pesantren dengan para santri belajar dan bertempat tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran yang berlangsung secara tradisional.
2. Pondok Pesantren Tipe B, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan pengajaran secara klasikal dan pengajaran oleh kyai bersifat aplikasi, diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama lingkungan pondok pesantren.
3. Pondok Pesantren Tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama sedangkan para santrinya belajar di luar (di madrasah atau sekolah umum lainnya), kyai hanya mengawasi dan sebagai Pembina para santri tersebut.
4. Pondok Pesantren Tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan system pondok pesantren dan sekaligus system sekolah atau madrasah.

Berdasarkan klasifikasi diatas, pesantren yang akan diteliti oleh penulis tergolong dalam pondok pesantren tipe D, yaitu pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Lembaga sekolah atau madrasah pada pesantren yang diteliti adalah milik pesantren atau masih dalam naungan pondok pesantren. Lembaga tersebut adalah SMP Ma’arif 8 Sendang Agung, dan SMK Ma’arif 1 Sendang Agung.

³ Dr (Cand).H.Ali Mustofa, M.Pd.I , Sungkowo S.Ag,M.Pd.I , Bashori,S.Ag,M.Pd.I ‘ *’Pendidikan Aswaja dan Ke – NU an MA/SMA/SMK kelas X’’* (Lampung Tengah : PC. LP. Ma’arif NU Lampung Tengah,2015) hlm. 3

Laporan Keuangan Pondok Pesantren

Menurut Miftahol (2013) Laporan keuangan pondok pesantren adalah suatu proses dalam pengaturan kegiatan atau aktivitas keuangan pada pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang ada di dalamnya, termasuk kegiatan planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh ketua pengurus dan bendahara, atau kepala madrasah bersama bendaharan madrasah pada sector lembaga pendidikan formal yang ada di bawah naungan institusi yayasan pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan suatu entitas pelaporan yang memiliki badan hukum berbentuk yayasan.

Pedoman Akuntansi Pesantren dibuat sebagai bentuk keberpihakan Ikatan Akuntasi Indonesia dan Bank Indonesia pada pemberdayaan ekonomi di pondok pesantren dan agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sehingga nantinya laporan keuangan yang disajikan oleh pondok pesantren akuntabel (IAI, 2018).

Di dalam Pedoman Akuntansi Pesantren (IAI, 2018) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh yayasan pondok pesantren adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi, dan

sebagai bentuk pertanggung jawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda dilakukan oleh Bendahara Pesantren. Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk memberikan informasi tentang keuangan pondok dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pesantren. Penyusunan laporan keuangan PP Mafda berisi tentang catatan penerimaan dan pengeluaran selama satu bulan. Penerimaan tersebut terdiri dari :

- a. Kontribusi santri yang diterima, yaitu berupa pembayaran bulanan, pembayaran awal masuk pondok pesantren, pembayaran daftar ulang, dan pembayaran biaya tambahan lainnya seperti tagihan telepon, setrika, alfa jama'ah, dan lain sebagainya. Untuk pembayaran bulanan setiap santri dikenakan biaya sebesar Rp.440.000, dengan rincian: Rp.400.000 untuk biaya makan, dan Rp.40.000 untuk biaya SPP atau syahriyah pesantren, biaya awal masuk pondok pesantren Rp.1.600.000, dan biaya daftar ulang sebesar Rp. 150.000.
- b. Tabungan ziaroh santri, Rp.100.000 untuk pangkal/awal masuk pondok, kemudian untuk setiap bulanya dapat menabung berapapun nominalnya.
- c. Sumbangan dana dari pihak lain, seperti sumbangan dana dari lembaga pendidikan, sumbangan dari wali santri, dan sumbangan dari pihak luar pesantren.

Adapun pengeluaran yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Mafatikhul Huda adalah pengeluaran untuk biaya makan santri, biaya tagihan listrik, biaya bisyaroh untuk ustadz/ustadzah diniyah, serta biaya yang mendukung aktivitas operasional pesantren lainnya.

Pencatatan kas yang dilakukan PP Mafda menggunakan sistem pencatatan single entry atau pembukuan. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan atau debit dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran atau kredit. Sistem pencatatanya dilakukan dua kali, yakni pada buku kas kecil, dan buku kas besar.

Pada buku kas kecil, transaksi yang dicatat meliputi kegiatan operasional yang dilakukan pada tiap harinya, seperti pembelian lampu, pembelian snack rapat, pembayaran tagihan listrik, pembelian snack rutinan jum'at wage, penambahan atau pemasukan syahriah pesantren, piutang santriwati, dan transaksi lainnya.

Sedangkan pada buku kas besar, transaksi yang dicatat adalah transaksi yang mencakup kegiatan operasional yang telah dilakukan selama satu bulan. Atau bisa dikatakan bahwa Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri membuat laporan keuangan setiap 1 bulan sekali.

Tabel 1.1
Contoh pencatatan transaksi yang dilakukan pada buku kas kecil
Ponpes Mafatikhul Huda Sendangasri

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
				Rp.29.089.000
2/7	Pembelian solar disel		Rp.100.000	Rp.28.989.000
	Dipinjam Alfina		Rp.50.000	Rp.28.939.000
5/7	Rutinan wagean		Rp.230.000	Rp.28.709.000
	Spp pesantren	Rp.1.050.000		Rp.29.759.000
	Pembelian snack rapat		Rp.200.000	Rp.29.559.000
	Pembelian sanyo		Rp.450.000	Rp.29.109.000
9/7	Piutang Alfina	Rp.50.000		Rp.29.159.000
	Spp pesantren	Rp.700.000		Rp.29.859.000
15/7	Pembayaran listrik Juli		Rp.1.500.000	Rp.28.359.000
	Spp pesantren	Rp.675.000		Rp.29.034.000
	Tabungan ziaroh	Rp.375.000		Rp.29.409.000

25/7		Dipinjam zahra		Rp.150.000	Rp.29.259.000
30/7		Piutang zahra	Rp150.000		Rp.29.409.000

Tabel 1.2

Contoh pencatatan transaksi pada buku kas besar

Tgl	K	Keterangan	K	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Juni				
	A	Spp pesantren		Rp.26.014.000		Rp.26.014.000
	B	Tabungan Ziaroh		Rp.3.075.000		Rp.29.089.000
31/7		Spp pesantren	A	Rp.2.425.000		Rp.31.514.000
		Tabungan ziaroh	B	Rp.375.000		Rp.31.889.000
		Piutang santri	A	Rp.200.000		Rp.32.089.000
		Pembayaran listrik	A		Rp.1.500.000	Rp.30.589.000
		Dipinjam santri	A		Rp.200.000	Rp.30.389.000
		Operasional lainnya	A		Rp.980.000	Rp.29.409.000
		Saldo Juli				
	A	Spp pesantren		Rp.25.959.000		Rp.25.959.000
	B	Tabungan ziaroh		Rp.3.450.000		Rp.29.409.000

Pada table 1.1 penulis memberikan contoh pencatatan transaksi pada buku kas kecil periode Juli 2022. Saldo pada bulan sebelumnya yakni pada bulan Juni berjumlah Rp.29.089.000. Kemudian pada tanggal 2 bulan Juli terjadi pengeluaran untuk pembelian solar disel Rp.100.000, dipinjam santriwati bernama Alfina Rp.50.000. Tanggal 5 Juli terjadi pengeluaran belanja untuk rutinan jumát wage Rp.230.000, pembelian snack rapat Rp.200.000, dan pembelian sanyo Rp.450.000, dan ada pemasukan syahriah pesantren Rp.1.050.000. Pada tanggal 9 Juli ada pemasukan dari piutang Alfina Rp.50.000, dan syahriah pesantren Rp.700.000. Tanggal 15 Juli terjadi pengeluaran untuk tagihan pembayaran listrik bulan Juli sebesar Rp.1.500.000, dan ada pemasukan dari dana syahriah pesantren Rp.675.000, dan tabungan ziaroh Rp.375.000. Tanggal 25 Juli terjadi pengeluaran Rp.150.000 dipinjam Zahra. Dan pada tanggal 30 Juli uang dikembalikan Rp.150.000.

Pada table 1.2 penulis memberikan contoh pencatatan transaksi pada buku kas besar yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri. Pada table tersebut, dicantumkan bahwa pada bulan Juni terdapat saldo sebesar Rp.29.089.000 dengan rincian :

Rp.26.014.000 adalah saldo kas syahriah pesantren, dan Rp.3.075.000 adalah saldo kas dari tabungan ziaroh. Pada table diatas juga dicantumkan huruf **K** yang berarti kode, untuk kode **A** berarti SPP atau syahriah pesantren, dan kode **B** berarti tabungan ziaroh.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa laporan keuangan yang disusun PP Mafda masih sangat sederhana yaitu berupa catatan kas yang berisi catatan transaksi penerimaan dan pengeluaran, pencatatan yang dilakukan menggunakan sistem pembukuan atau single entry. Sistem pencatatan seperti ini memiliki kelebihan mudah dipahami dan tidak rumit, namun juga memiliki kelemahan yaitu sulit mendeteksi bila terjadi kesalahan pencatatan dan informasi yang disajikan kurang lengkap karena hanya menampilkan kas masuk, kas keluar dan saldo kas saja.

Pengaruh Rekonsiliasi Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas Pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri

Rekonsiliasi adalah proses penyocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi diperlukan agar terjadi sinkronisasi antar entitas pelaporan dalam hal pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian hak dan kewajiban yang timbul dari suatu transaksi.⁴

Rekonsiliasi dalam kitab Fatkhul Qorib disebut sebagai *Shuluh*, yang diartikan sebagai akad yang dapat menghentikan pertikaian. Akad *shuluh* dapat dilakukan setelah pihak tertuduh mengakui kebenaran barang yang diperselisihkan. *Shuluh* dapat direalisasikan dalam hal materi atau hal yang berujung pada materi.⁵

Laporan Keuangan merupakan instrumen utama yang menjadi data perbandingan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi oleh setiap pemakai Laporan Keuangan. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perlu adanya prosedur atau tahapan yang baik, termasuk rekonsiliasi dalam menghasilkan kualitas baik. Organisasi sektor publik terutama pemerintahan sangat membutuhkan perilaku setiap individu terskema dan saling mendukung dan terintegrasi untuk mencapai tujuan organisasi. Indikator utama dalam teori perilaku organisasi adalah membentuk pola pemahaman, kepribadian dan perilaku setiap elemen yang terlibat sebagai bagian dari organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Kompetensi SDM dalam melakukan rekonsiliasi tersebut harus baik dan merupakan indikator dalam Manajemen PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020.

⁴ Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republic Indonesia (*jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat*)

⁵ Faishal Amin, HM Bahrn Nizar, Lutfi Syarifullah, Khozinatul Asror, M. Munir, M.masúd, M.amdad, MY. Muhtadi “*Menyikap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib*” (Kediri : Anfa’Press, 2015) hlm. 374

Pengaruh Rekonsiliasi Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas
(Study Kasus Pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri Lampung Tengah)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 210/PMK.05/2013 dalam lampirannya dijelaskan bahwa agar data akuntansi yang dihasilkan SAP dapat diandalkan, maka perlu melakukan rekonsiliasi untuk menjamin ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang mencakup proses rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh PA/KPA dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh BUN. Segala dokumen dan laporan harus menunjukkan kesesuaian sehingga mudah ditelusuri, maka perlu dilakukan rekonsiliasi sebagai salah satu strategi menuju kualitas laporan keuangan yang baik. Setiap pihak bagian akuntansi bersinergi rekonsiliasi untuk menghasilkan laporan yang valid dan pertanggungjawaban mutlak sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.⁶

Rekonsiliasi yang dapat dilakukan Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri yakni menyocokkan laporan keuangan pada buku kas kecil dengan laporan keuangan pada buku kas besar. Apabila saldo terakhir pada buku kas kecil sesuai dengan saldo pada buku kas besar, maka laporan keuangan dinyatakan valid. Namun, apabila saldo terakhir pada buku kas kecil dan kas besar berbeda, maka perlu adanya penyelidikan kembali, mungkin ada transaksi yang belum tercatat atau bisa terjadi sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh pihak keuangan pesantren.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Pengaruh Rekonsiliasi Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri, peneliti dapat mengambil kesimpulan berikut :

1. Penyusunan laporan keuangan PP Mafatikhul Huda Sendangasri sudah dilakukan. Dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran kas selama sebulan dengan menggunakan sistem pencatatan single entry atau pembukuan. Catatan kas tersebut yang kemudian oleh pihak keuangan pesantren disajikan sebagai laporan keuangan.
2. Kelemahan pada laporan keuangan yang dilakukan PP Mafda adalah tidak adanya kwitansi ataupun nota yang digunakan sebagai bukti transaksi.
3. Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri belum menyajikan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren. Dalam Pedoman Akuntansi Pesantren

⁶ Sever Ramabius Gulo “*Analisis Pengaruh Kompetensi Rekonsiliasi, Pengujian Koreksi Dan Implementasi Sistem Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021) hlm.28-29

Pengaruh Rekonsiliasi Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas
(Study Kasus Pada Pondok Pesantren Mafatikhul Huda Sendangasri Lampung Tengah)
disebutkan bahwa laporan keuangan pondok pesantren yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

4. Pada laporan keuangan yang telah dilakukan oleh PP Mafaikhul Huda, rekonsiliasi berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian kas.

Daftar Pustaka

- Dr (Cand).H.Ali Mustofa, M.Pd.I , Sungkowo S.Ag,M.Pd.I , Bashori,S.Ag,M.Pd.I
‘ *Pendidikan Aswaja dan Ke – NU an MA/SMA/SMK kelas X*’ (Lampung Tengah : PC.
LP. Maárif NU Lampung Tengah,2015)
- Faishal Amin, HM Bahrún Nizar, Lutfi Syarifullah, Khozinatul Asror, M. Munir, M.masúd,
M.amdad, MY. Muhtadi “*Menyikap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al-Qorib*” (
Kediri : Anfa’Press, 2015)
- Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republic Indonesia (*jl. DR.
Wahidin No. 1 Jakarta Pusat*)
- Mega Purnama Garnasih Fatmawati Sutarti ‘ *’Pengaruh Sisitem Akuntansi Dan Rekonsiliasi
Bank Terhadap Efektivitas Pengendalian Kas Pada Koperasi Sejahtera*’ (Bogor :
Kampus Ilmu Ekonomi Kesatuan,2018)
- Sever Ramabius Gulo “*Analisis Pengaruh Kompetensi Rekonsiliasi, Pengujian Koreksi Dan
Implementasi Sistem Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Nias*” (Medan: Universitas Sumatera Utara,